

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Maka dari data yang di peroleh penulis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan pelayanan pendidikan di Kota Serang belum terlaksana secara optimal sesuai dengan amanat dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dikarenakan pada Pasal 14 ayat (2) point a di sebutkan bahwa “pemberian jaminan pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA/SMK” sedangkan dari data yang di peroleh peneliti dapat dilihat bahwa yang mendapatkan bantuan layanan pendidikan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu siswa-siswi tingkat SD, SMP, SMA/SMK saja. Dan dikarenakan juga terdapat 6.765 masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan

2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan perspektif siyasah dusturiyah di jelaskan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui program bantuan pelayanan pendidikan belum sesuai dengan asas-asas siyasah dusturiyah, asas-asas yang dimaksud ialah asas umum pemerintahan yang baik, asas keseimbangan sosial dan asas tanggungjawab negara dalam hal ini ialah Pemerintah Kota Serang karena dari sisi pelaksanaan peraturan tersebut pada kenyataannya dilapangan masih banyak ditemukan masyarakat miskin yang tidak merasakan program bantuan pelayanan pendidikan yang di jalankan Pemerintah Kota Serang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penegak Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan diharapkan tanggung jawabnya terhadap penerapan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan isi yang ada

didalam Peraturan Daerah tersebut. Pemerintah Kota Serang melalui Dinas yang bersangkutan harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan pendataan mengenai masyarakat miskin di Kota Serang agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.

2. Untuk mencapai terimplementasinya kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang lebih efektif diharapkan pihak Pemerintah Kota Serang mengadakan evaluasi berkala agar kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program pelayanan pendidikan dasar yang dilaksanakan bisa diketahui kelebihan dan kekurangannya, kebaikan kebijakan ini bisa dijalankan dimasa yang akan datang supaya kebijakan selanjutnya bisa dijalankan dan implementasikan dengan sempurna.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi dalam kajian hukum tatanegara khususnya dalam bidang Pemerintah Daerah.